

# 2025



# RENJA RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas perkenan-Nya kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan peraturan turunan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2023 ini dilaksanakan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPMPTSP Kota Prabumulih, evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2025 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Dokumen RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2025.

Prabumulih, 13 Februari 2024  
**Pt. KEPALA DINAS,**  
  
**Drs. H. MUHAMMAD ALI, M.Si**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 196604121993121001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih ini memuat program dan kegiatan untuk tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2024 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Prabumulih Tahun 2024, yang selanjutnya Renja DPMPTSP ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu:

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2024. RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RENJA.
2. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih berpedoman pada RENSTRA DPMPTSP Kota Prabumulih, evaluasi hasil RENJA tahun lalu dan evaluasi hasil RENJA tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan RENJA berdasarkan Surat Edaran Walikota Prabumulih Nomor 050/21/BAPPEDA/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Perumusan Rancangan Akhir RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih.
5. Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Prabumulih.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);
14. Surat Edaran Walikota Prabumulih Nomor: 050/21/Bappeda/2024 Tanggal 16 Januari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan penyusunan RENJA DPMPTSP Tahun 2025 adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
2. Sebagai media untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*);
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja seperti: **Latar Belakang** (yang berisi pengertian, proses penyusunan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya); **Landasan Hukum** (berisikan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menjadi pedoman/ acuan dalam penyusunan perencanaan); **Maksud dan Tujuan** (berisi maksud dan tujuan dari penyusunan Renja) dan **Sistematika Penulisan** yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD.

**BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Rensta, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD, dan penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan Kegiatan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Capaian Renstra DPMPTSP**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil.

Hasil kinerja secara mandiri ditunjukkan dengan tercapainya target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Prabumulih. Berikut adalah IKU DPMPTSP Kota Prabumulih:

1. Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP);
2. Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan (Nilai IKM);
4. Jumlah investasi PMDN dan PMA (Persentase Realisasi Investasi)

Adapun keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kota Prabumulih yang telah direncanakan dan disusun pada tahun 2023 telah berhasil dicapai dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPTSP memperoleh nilai sebesar **79,08** dengan kategori **BB** masuk dalam interpretasi **SANGAT BAIK**;
- Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti **tingkat capaian kerjanya sebesar 100%**;
- Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **90,15** dengan kategori **A** masuk dalam Mutu Pelayanan **SANGAT BAIK**;
- Capaian nilai **Realisasi Investasi Tahun 2023** sebesar **Rp377.342.618.121,-** melebihi target yang telah ditentukan berdasarkan Renstra DPMPTS Kota Prabumulih Tahun 2023 sebesar **Rp125.000.000.000,.**

Akuntabilitas Kinerja Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2023 ditunjukkan dari sisi pengeluaran Belanja Operasi dan Belanja Modal sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dimana anggaran belanja operasi dan belanja modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) TA 2023 ditetapkan sebesar **Rp6.484.390.409,-**.

Dalam pelaksanaannya, belanja Operasi dan Belanja Modal pada DPA TA 2023 mengalami peningkatan anggaran hingga menjadi Rp8.036.473.706,-. Penambahan anggaran belanja operasi dalam DPA-OPD Perubahan TA 2023 dan DPA-OPD Pergeseran setelah DPA – OPD – Perubahan TA 2023 ini dikarenakan Kebijakan Pemerintah mendorong keberadaan mal pelayanan publik (MPP) untuk peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menginginkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah serta peningkatan investasi penanaman modal di Kota Prabumulih sehingga DPMPTSP mendapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp1.552.083.297,- atau sebesar 19,31% dengan rincian anggaran sebesar Rp438.200.000,- untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dan anggaran sebesar Rp1.113.883.297,- untuk belanja pegawai mengalami penyesuaian anggaran dengan penambahan sebesar Rp636.175.297,- dan belanja barang dan jasa bertambah sebesar Rp769.308.000,- serta untuk tambahan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp146.600.000,-. Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal DPMPTSP TA 2023 sebesar Rp7.691.434.080,- atau sebesar 95,71% dari anggarannya.

**Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2023**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.400.000	96,00	96,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.915.638.706	5.755.860.223	97,30	97,30
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.280.000	53.280.000	100,00	100,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	5
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	2.487.000	99,48	99,48
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	44.764.685	99,48	99,48
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.761.000	97,61	97,61
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	42.213.200	84,43	84,43
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.700.000	42.678.000	99,95	99,95
17	Penyediaan Bahan/Material	70.300.000	70.299.700	100,00	100,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.000.000	494.926.386	99,99	99,99

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	5
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
19	Pengadaan Mebel	38.700.000	33.595.662	86,81	86,81
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.228.000	161.929.000	98,60	98,60
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.999.000	78.460.974	78,46	78,46
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	19.920.000	99,60	99,60
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.000.000	48.073.500	81,48	81,48
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.280.000	103.352.750	97,25	97,25
26	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	83.830.000	98,62	98,62
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>				
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
27	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	65.000.000	59.514.000	91,56	91,56

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	5
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				
<b>10</b>	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
28	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	90.000.000	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				
<b>11</b>	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
29	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	32.848.000	32.848.000	100,00	100,00
30	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>				
<b>12</b>	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	245.680.000	237.860.000	96,82	96,82
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	222.520.000	103.580.000	46,55	46,55

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	5
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>				
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
33	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70.000.000	69.500.000	99,29	99,29
	<b>Total</b>	<b>8.036.473.706</b>	<b>7.691.434.080</b>	<b>95,71</b>	<b>95,71</b>

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Renja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2023 dan Realisasi Renstra

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN
					VOL	%	
<b>2.18.18</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						<b>88,76</b>
<b>2.18 2.18.18 1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>96,30</b>	<b>96,3</b>
<b>2.18 2.18.18 1 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	100	100
<b>2.18 2.18.18 1 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					80	80
2.18 2.18.18 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	12	100	100
2.18 2.18.18 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Orang	36	100	100
2.18 2.18.18 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1	100	100

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN
					VOL	%	
<b>2.18 2.18.18 1 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					100	100
2.18 2.18.18 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	Orang	24	100	100
<b>2.18 2.18.18 1 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					100	100
2.18 2.18.18 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	Orang	35	100	100
<b>2.18 2.18.18 1 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1	Paket	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	100	100
<b>2.18 2.18.18 1 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					100	100
2.18 2.18.18 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	77	Unit	77	100	100
2.18 2.18.18 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	Unit	32	100	100

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN
					VOL	%	
<b>2.18 2.18.18 1 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					100	100
2.18 2.18.18 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2	Laporan	2	100	100
<b>2.18 2.18.18 1 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					100	100
2.18 2.18.18 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	7	100	100
2.18 2.18.18 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	100	100
<b>2.18 2.18.18 2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>					<b>100,00</b>	<b>100</b>
<b>2.18 2.18.18 2 2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>					100	100
2.18 2.18.18 2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100	100
<b>2.18 2.18.18 3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>					<b>100,00</b>	<b>100</b>
<b>2.18 2.18.18 3 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					100	100
2.18 2.18.18 3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	Dokumen	3	100	100

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN
					VOL	%	
<b>2.18 2.18.18 4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>					<b>100,00</b>	<b>100</b>
2.18 2.18.18 4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					100	100
2.18 2.18.18 4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	80	Kegiatan Usaha	80	100	100
2.18 2.18.18 4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	2	Laporan	2	100	100
<b>2.18 2.18.18 5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>					<b>31,73</b>	<b>31,73</b>
2.18 2.18.18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					31,73	31,73
2.18 2.18.18 5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	Kegiatan Usaha	0		
2.18 2.18.18 5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	320	Pelaku Usaha	228	71,25	71,25
2.18 2.18.18 5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	405	Kegiatan	97	23,95	23,95
<b>2.18 2.18.18 6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>					<b>100,00</b>	<b>100</b>
2.18 2.18.18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100	100
2.18 2.18.18 6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2	Dokumen	2	100	100

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan OPD yang mengemban amanah masyarakat Kota Prabumulih dalam hal Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, mempunyai indikator kinerja untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan/ditargetkan.

Pengukuran kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan tertuang dalam indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Prabumulih. Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja kegiatan yang tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan yang selanjutnya dilakukan evaluasi agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Berikut adalah analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2023.

1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dikeluarkan oleh Inspektorat dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Pada **tahun 2022** yang lalu hasil evaluasi DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **79,08** dengan kategori **“BB”** masuk dalam interpretasi **Sangat Baik** dan sesuai target yang telah ditetapkan, yang berarti Akuntabilitas kinerjanya sangat baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Untuk tahun 2023 ini **target nilai SAKIP DPMPTSP** adalah **“A”** tetapi untuk hasil evaluasi atas

implementasi sistem akuntabilitas kinerja DPMPSTP TA 2023, belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat sampai dengan bulan Januari 2024.

2. Audit tim Inspektorat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Kota Prabumulih Nomor: 700/413/ST/Inspektorat.III/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Melakukan Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 14 Juli 2023 di Kantor DPMPSTP Kota Prabumulih terdapat temuan sebagai berikut:

## **TAHAP PELAKSANAAN**

### **1) ASPEK EFISIENSI**

#### **Temuan/ Penyebab**

##### ***Pada Poin 1)***

##### ***Kondisi***

*Pada saat reviu, Tim Inspektorat menemukan uji kesesuaian prosedur penerbitan izin untuk Jenis Perizinan dengan Standar Operasional Prosedur, sampel diambil dari berkas pemohon izin sektor Pekerjaan Umum sebanyak 1 (satu) sampel, sektor Kesehatan sebanyak 20 (dua puluh) sampel, sektor Perhubungan sebanyak 2 (dua) sampel dan sektor Pendidikan sebanyak 6 (enam) sampel. Hasil pengujian, 90% sampel mengalami keterlambatan waktu penerbitan.*

*Hal ini belum sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, Nomor: 37/KPTS/DPMPSTP.VI/ 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.*

##### ***Akibat***

*Keterlambatan waktu dalam penerbitan Perizinan.*

##### **Komentar pejabat yang diperiksa**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sependapat bahwa waktu penerbitan perizinan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

## **2) ASPEK EFEKTIVITAS**

### **Temuan/ Penyebab**

#### ***Pada Poin 1)***

#### ***Kondisi***

*Pada saat reuiu, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terbentuk Maklumat Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Nomor: 36/KPTS/DPMPTSP.VI/2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.*

#### **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

1. Dengan ini kami pimpinan dan seluruh pegawai DPMPTSP Kota Prabumulih menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati Maklumat Pelayanan Publik ini dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kami siap melakukan perbaikan dan kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau memberikan kompensasi;
2. Memberikan layanan dengan mudah, cepat dan transparan;
3. Menyiapkan petugas yang berpenampilan rapi, berdedikasi dan siap melayani;
4. Menyiapkan ruang dan fasilitas pelayanan yang bersih, sejuk, nyaman dan tertata baik;
5. Memberikan layanan dengan penuh tanggung jawab integritas yang tinggi;
6. Merespon dengan cepat terhadap keluhan yang disampaikan;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana informasi yang diperlukan.

**Hal ini belum sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pasal 11 :

**Ayat (2) :** *“Maklumat Pelayanan Publik, paling sedikit memuat jenis pelayanan yang di sediakan:*

- a. Syarat
- b. Prosedur
- c. Biaya
- d. Waktu
- e. Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat
- f. Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan”

**Ayat (3) :** “MPP Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat”.

#### **Akibat**

Redaksional dokumen Maklumat Pelayanan Publik dan Pejabat otoritas penetapan dokumen dimaksud belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Komentar pejabat yang diperiksa**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sependapat, Maklumat Pelayanan Publik yang di tandatangani oleh Kepala Dinas akan diperbaiki redaksionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Walikota Prabumulih.

#### **Temuan/ Penyebab**

##### **Pada Poin 2)**

##### **Kondisi**

**Pada saat reviu pada** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Nomor: 37/KPTS/DPMPTSP.VI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, memuat:

- a. *Dasar Hukum*
- b. *Persyaratan Pelayanan*
- c. *Prosedur Pelayanan*
- d. *Jangka Waktu Penyelesaian*
- e. *Biaya/tarif*
- f. *Produk Pelayanan*

**Hal ini belum sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Daerah, Pasal 13:

**Ayat (1)** : *“Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit meliputi:*

- a. *Dasar Hukum*
- b. *Persyaratan*
- c. *Sistem, Mekanisme dan Prosedur*
- d. *Jangka waktu penyelesaian*
- e. *Biaya/ tarif*
- f. *Produk pelayanan*
- g. *Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas*
- h. *Kompetensi pelaksana*
- i. *Pengawasan internal*
- j. *Penanganan pengaduan, saran dan masukan*
- k. *Jumlah pelaksana*
- l. *Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan*
- m. *Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan*
- n. *Evaluasi kinerja pelaksana”*

*Untuk huruf g sampai dengan n belum terpenuhi pada Standar pelayanan yang*

ada saat ini.

**Ayat (2)** : “Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”.

### **Akibat**

Dokumen Standar Pelayanan belum sepenuhnya mempedomani aturan yang berlaku.

### **Komentar pejabat yang diperiksa**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sependapat, Standar Pelayanan akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

### **Temuan/ Penyebab**

#### **Pada Poin 3)**

#### **Kondisi**

**Pada saat reviu** Standar Operasional Prosedur Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Nomor: 36/KPTS/DPMPTSP.VI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

**Hal ini belum sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pasal 14:

**Ayat (2)** : “Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”.

## **Akibat**

*Dokumen Standar Pelayanan belum sepenuhnya mempedomani aturan yang berlaku.*

## **Komentar pejabat yang diperiksa**

*Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sependapat, Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.*

Dalam pelaksanaannya tim Inspektorat Kota Prabumulih memberikan **saran** kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih untuk:

- a. Maklumat Pelayanan Publik disempurnakan sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang berlaku dan ditanda tangani oleh Walikota Prabumulih.
  - b. Standar Pelayanan dilengkapi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.
  - c. Standar Operasional Prosedur agar ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.
  - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih selaku Koordinator pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang termasuk dengan Tim Teknis untuk mencapai Pelayanan Perizinan yang tepat waktu.
3. Audit tim Inspektorat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Kota Prabumulih Nomor: 700/355/Inspektorat.III/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Melakukan Audit Ketaatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik tahun anggaran 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni s.d 07 Juli 2023 di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih terdapat temuan sebagai berikut:

## **TAHAP PELAKSANAAN**

### **1. ASPEK EFISIENSI**

#### **Temuan/ Penyebab**

##### ***Pada Poin 1)***

##### ***Kondisi***

*Dari hasil pemeriksaan, Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal ditemukan bahwa pada Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dan CV Tri Pancari belum memuat Klausul Perjanjian Jaminan Pengadaan Barang/Jasa diantara Jaminan Pemeliharaan dari pihak penyedia jasa untuk memperbaiki aplikasi apabila sewaktu-waktu terjadi pemasalahan/ kerusakan.*

**Sebab** *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku.*

##### ***Akibat***

*Pelaksanaan Pengadaan Aplikasi Pengolahan dan Informasi Penanaman Modal berpotensi tidak berjalan secara optimal.*

##### ***Komentar pejabat yang diperiksa***

*Segera meminta kepada Penyedia Aplikasi untuk membuat Surat Pernyataan kesanggupan memperbaiki aplikasi bila sewaktu-waktu terjadi masalah.*

## Saran dan Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih agar, Mendapatkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pihak Penyedia untuk memperbaiki aplikasi apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan/kerusakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Audit tim Inspektorat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Kota Prabumulih Nomor: 700/414/Inspektorat.III/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Melakukan Verifikasi Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih terdapat temuan sebagai berikut:

### TAHAP PELAPORAN

#### Temuan/ Penyebab

##### *Kondisi*

#### ***Aspek Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih per 31 Mei 2023***

*Berdasarkan Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Periode 01 Januari s/d 31 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut:*

**Tabel 2.3**  
**Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**  
**Periode 01 Januari s/d 31 Mei 2023**

No.	No SP2D	Jenis SP2D	Nilai (Rp)
1	0017/SP2D-LS-GJ/BPKAD/2023	LS	147.552.490
2	11.10/04.0/000001/UP/2.18.0.00.0.00.1 8.0000/M/I/20	UP	200.000.000
3	0068/SP2D-LS-GJ/BPKAD/2023	LS	215.126.573
4	0130/SP2D-LS-GJ/BPKAD/2023	LS	215.401.732

5	0190/SP2D-LS-GJ/BPKAD/2023	LS	9.501.225
6	0087/SP2D-LS-GJ/BPKAD/2023	LS	234.090.050
7	0091/SP2D-LS-GJ/BPKAD/2023	LS	234.194.350
8	0180/SP2D-GU/BPKAD/2023	GU	196.721.196
9	0214/SP2D-LS-GJ/BPKAD/2023	LS	216.049.299
10	0242/SP2D-LS/BPKAD/2023	LS	236.839.500
11	0272/SP2D-LS-GJ/BPKAD/2023	LS	216.048.550
12	0314/SP2D-LS-GJ/BPKAD/2023	LS	216.825.203
13	0380/SP2D-LS/BPKAD/2023	LS	233.808.700
14	0441/SP2D-GU/BPKAD/2023	GU	176.269.289
15	0442/SP2D-TU/BPKAD/2023	TU	120.780.000
<b>Jumlah</b>			<b>2.869.208.157</b>

*Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran dari 1 Januari s/d 31 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut:*

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran dari 1 Januari s/d 31 Mei 2023**

No.	Bulan	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp)	SPJ
1	Januari	347.552.490	198.551.198	Lengkap
2	Februari	215.126.573	263.299.945	Lengkap
3	Maret	889.908.553	804.622.473	Lengkap
4	April	668.937.349	742.731.430	Lengkap
5	Mei	747.683.192	747.760.286	Lengkap
<b>Jumlah</b>		<b>2.869.208.157</b>	<b>2.756.965.332</b>	

Saldo Buku Kas Umum per 31 Mei 2023 sebesar		Rp. 112. 242.825,-
Terdiri dari	Saldo Bank	Rp. 97.242.825,-
	Uang Tunai	-
	Panjar Pakaian Dinas	Rp. 15.000.000,-

Pajak yang telah dipungut dari 01 Januari s/d 11 Juli 2023

Pajak yang dipungut	:	Rp. 21.013.038,-
Pajak yang sudah disetor	:	Rp. 17.438.714,-
Pajak yang belum disetor per 11 Juli 2023	:	Rp. 3.574.324,-

**Aspek Sumber Daya Manusia sampai 31 Mei 2023**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih per 31 Mei 2023, dengan rincian sebagai berikut:**

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	I	-	-	-
2.	II	1	2	3
3.	III	14	29	43
4.	IV	5	4	9
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>35</b>	<b>55</b>

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon**

No.	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	1	-	1
3.	Eselon IV	-	1	1
4.	Fungsional	8	14	22
5.	Staf	10	20	30
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>35</b>	<b>55</b>

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2 (S-2)	7	10	17
2.	Strata 1 (S-1)	11	21	32
3.	Sarjana Muda / D3	1	2	3
4.	SLTA/SMK/KPPA	1	2	3
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>35</b>	<b>55</b>

**Aspek Sarana dan Prasarana per 31 Mei 2023**

Hasil Verifikasi terhadap sarana prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih telah Menyelenggarakan:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
2. KIB B Peralatan dan Mesin
3. Buku Barang Habis Pakai

**Berdasarkan Hasil Verifikasi yang dilakukan, belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Memori Serah Terima Jabatan Aspek Kepegawaian (Sumber Daya Manusia), Aspek Keuangan dan Aspek Aset – Inventaris dari Pejabat lama dengan Pejabat yang baru.**

**Tindak Lanjut dari Auditee DPMPSTSP Kota Prabumulih**

Auditee sependapat dengan hasil verifikasi tim auditor, Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Memori Serah Terima Jabatan Aspek Kepegawaian (Sumber Daya Manusia), Aspek Keuangan dan Aspek Aset – Inventaris akan segera dibuat dan di tandatangani oleh pejabat lama dengan pejabat yang baru.

**Saran dan Rekomendasi**

Dari hasil Verifikasi Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2023, Tim Inspektorat Daerah Kota Prabumulih menyarankan untuk segera membuat Berita Acara

Serah Terima Jabatan dan Memori Serah Terima Jabatan Aspek Kepegawaian (Sumber Daya Manusia), Aspek Keuangan dan Aspek Aset – Inventaris dari Pejabat lama dengan pejabat yang baru.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 2 (dua) periode selama tahun 2023, yaitu pada **Semester Pertama** dilaksanakan pada bulan Januari s.d Juni 2023 dan **Semester Kedua** pada bulan Juli s.d Desember 2023. Sebagai dasar hukum kegiatan survey ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Variabel penelitian yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini terdiri dari 9 (sembilan) variabel, yaitu: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu/kecepatan pelayanan, biaya/tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

- **Survey Semester Pertama (Periode Januari – Juni 2022)**

Responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah Pelanggan atau Masyarakat Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terdiri 150 orang responden yang dipilih secara acak/random pada saat pengguna izin mengambil izin yang sudah selesai. Lokasi dari Pengumpulan data sendiri dilakukan pada *Front Office* loket 4. Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPSTSP Kota Prabumulih semester 1 tahun 2023 diperoleh hasil, **Nilai IKM 89.76** yang memiliki **Mutu Pelayanan “A”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih Semester 1 tahun 2023 adalah **”SANGAT BAIK”**.

- **Survei Semester Kedua (Periode Juli – Desember 2022)**

Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih Semester II tahun 2023 yang terdiri 150 orang responden yang dipilih secara acak/random pada saat pengguna izin mengambil izin yang sudah selesai diperoleh hasil, **Nilai IKM 90.55** dengan **Mutu Pelayanan “A”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih semester II tahun 2023 adalah ” **SANGAT BAIK**“.

Jadi, untuk nilai IKM DPMPTSP Tahun 2023 adalah jumlah nilai rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2, maka didapat **nilai IKM Tahun 2023** adalah **90,15** dengan **Mutu Layanan “SANGAT BAIK”**. Akan tetapi nilai ini belum melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu **88**.

**Tabel 2.8**  
**Nilai IKM DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2023**

Tahun	Semester 1		Semester 2		Rata-Rata Thn 2023	
	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan
2023	89,76	A	90,55	A	<b>90,15</b>	<b>A</b>

b

sumber: Laporan SKM DPMPTSP Kota Prabumulih Th. 2023

6. Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023, DPMPTSP pada tahun 2023 mempunyai target investasi sebesar **Rp125.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah)**, sementara berdasarkan target BKPM RI, DPMPTSP Kota Prabumulih dibebankan target investasi sebesar **Rp699.729.890.450,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**. Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2023 **Rp377.342.618.121,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah)**. Dari data tersebut DPMPTSP telah

mampu melampaui target yang ditentukan diatas, dengan pencapaian persentase sebesar **301,88%** dari target yang telah ditentukan berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih. Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian Investasi Tahun 2023} &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023}}{\text{Nilai Target Investasi Tahun 2023}} \times 100 \\ &= \frac{\text{Rp } 377.342.618.121}{\text{Rp } 125.000.000.000} \times 100 \\ &= \mathbf{301,88 \%}\end{aligned}$$

7. Pada periode Januari - Desember 2023 terdapat 1 (satu) laporan pengaduan masyarakat yang di terima oleh DPMPTSP Kota Prabumulih perihal pengaduan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu:

- Pada tanggal 9 Juni 2023 telah diterima pengaduan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari warga RT 05 RW 01 Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih mengenai permasalahan tuntutan warga dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) terkait dampak keberadaan Tower BTS. Dimana warga lokasi sekitar berdiri tower merasa dirugikan atas keberadaan tower dan selalu kena imbas dari tower yang terkena sambaran petir dan berakibat warga mengalami kerugian antara lain:
  - **Moril**, yaitu ketakutan, keresahan, keamanan dan ketidaknyamanan warga
  - **Materil**, yaitu banyak alat elektronik dan instalasi warga sekitar mengalami kerusakan.

Warga juga mengharapkan kontribusi keberadaan Tower BTS terhadap warga sekitar lokasi serta menuntut untuk pengecekan kembali masalah perizinan (PBG).

**Tabel 2.9**  
**Laporan Pengaduan Semester I Tahun 2023**

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Periode	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang belum ditindaklanjuti
1.	PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	1	Januari - Juni	1	-

Sumber: Laporan Pengaduan DPMPTSP Kota Prabumulih Th. 2023

Dari pengaduan tersebut telah dilakukan penanganan dan tindaklanjut oleh Bidang Pengaduan Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih mulai dengan berkoordinasi dengan Kedua Belah Pihak dan Instansi Pemerintahan setempat (Kelurahan). DPMPTSP menginisiasi untuk memediasi antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Kelurahan karena dalam hal perizinan tidak ada masalah dan dari hasil mediasi diambil kesepakatan “Bahwa Pihak PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) bersedia untuk memenuhi semua tuntutan warga dengan kesepakatan kedua belah pihak”. Dalam hal ini pengaduan masyarakat pada periode Tahun 2023 telah ditindaklanjuti 100%.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka (20) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021). LKPM ini disampaikan setiap triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam proses pembangunan atau belum berproduksi, dan laporan semester wajib bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi. Pelaku usaha wajib melaporkan seluruh kegiatan penanaman modalnya melalui *aplikasi LKPM online*.

DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai instansi yang membidangi penanaman modal Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan pemantauan investasi di Kota Prabumulih secara rutin melalui LKPM online, dan didapatkan data total nilai realisasi investasi di Kota Prabumulih tahun 2023 sebesar **Rp377.342.618.121,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah)**. Adapun Data Investasi per Triwulan Tahun 2022 dan 2023 disajikan pada grafik di bawah.

**Gambar 2.1 Grafik Investasi Per Triwulan Tahun 2022 dan 2023 Kota Prabumulih**



Sumber : LKPM Online

Berdasarkan grafik di atas, total **nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp377.342.618.121,-** dan terjadi penurunan total **nilai investasi di tahun 2022 sebesar Rp446.597.264.375,-** akan tetapi capaian nilai investasi tetap melebihi target di tahun 2023 yang telah ditentukan berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih sebesar Rp125.000.000.000,-. Nilai investasi di Kota Prabumulih tahun 2023 mengalami **penurunan sebesar 15,51% (year-on-year)**.

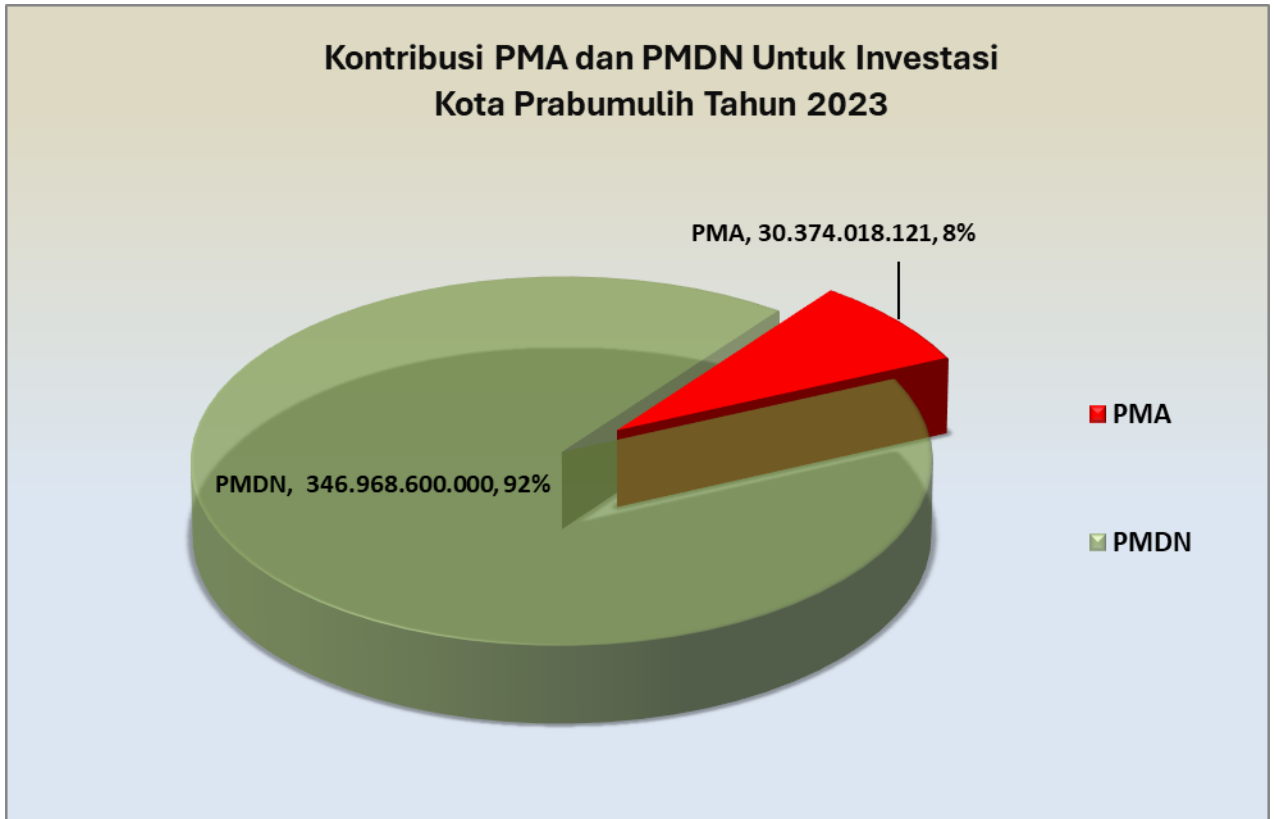
Penurunan realisasi investasi di Kota Prabumulih terjadi karena turunnya nilai investasi kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dari PT Kalingga Murda, dimana pada tahun 2022 PT Kalingga Murda yang bergerak disektor real estate dengan total nilai investasi mencapai Rp158,27 Milyar sedangkan pada tahun 2023 total nilai investasi PT Kalingga Murda mengalami penurunan sebesar Rp157,47 Milyar dengan total nilai investasi sebesar Rp803,63 Juta. Kemudian pada tahun 2023 juga terdapat penurunan nilai investasi kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari PT Subur Sedaya Maju yang bergerak disektor konstruksi dengan total nilai investasi mencapai Rp92,47 Milyar sedangkan pada tahun 2023 total nilai investasi PT Subur Sedaya Maju mengalami penurunan sebesar Rp89,82 Milyar dengan total nilai investasi sebesar Rp2,65 Milyar.

Berdasarkan jenisnya, realisasi investasi penanaman modal dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Penanaman Modal Asing (PMA);
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Berikut besaran kontribusi PMA dan PMDN atas nilai total investasi Kota Prabumulih tahun 2023.

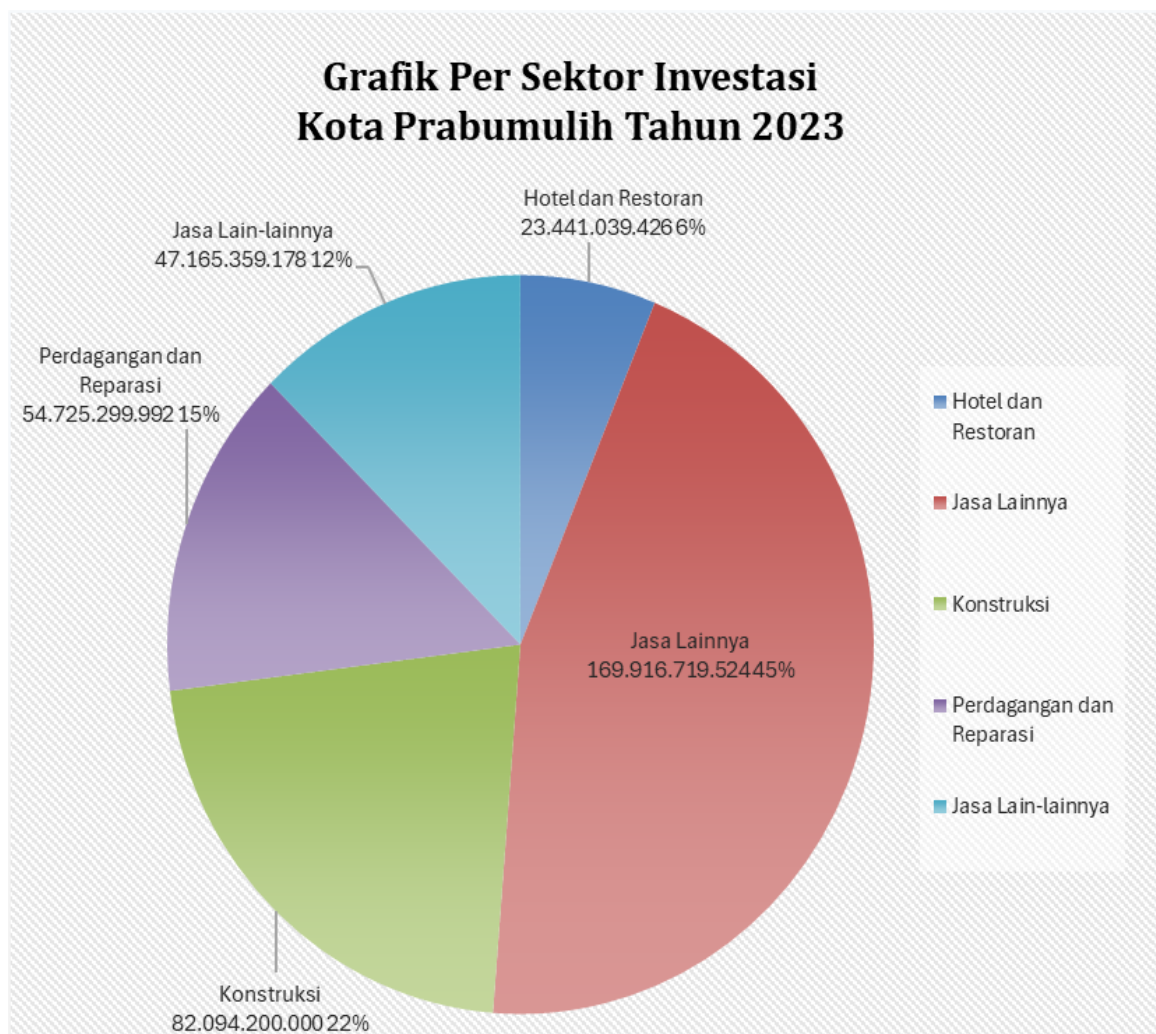
Gambar 2.2 Grafik Kontribusi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2023



Sumber: LKPM Online, diolah

Berdasarkan grafik di atas, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kontribusi dominan dengan total nilai investasi sebesar Rp346.96 milyar (92%) dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp30,37 milyar (8%) sepanjang tahun 2023. Realisasi investasi PMA di Kota Prabumulih berasal dari investor negara Belanda (Sektor Perhotelan dan Restoran; Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran serta Sektor Jasa Lainnya), Malaysia (Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan), Singapore (Sektor Perdagangan dan Reparasi), Thailand (Sektor Perdagangan dan Reparasi), Korea Selatan (Sektor Listrik, Gas dan Air) dan Kepulauan Virgin Inggris (Sektor Pertambangan dan Sektor Jasa Lainnya). Selanjutnya, berdasarkan laporan penanaman modal per sektor untuk lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.3 Grafik Laporan Per Sektor Investasi Kota Prabumulih 2023

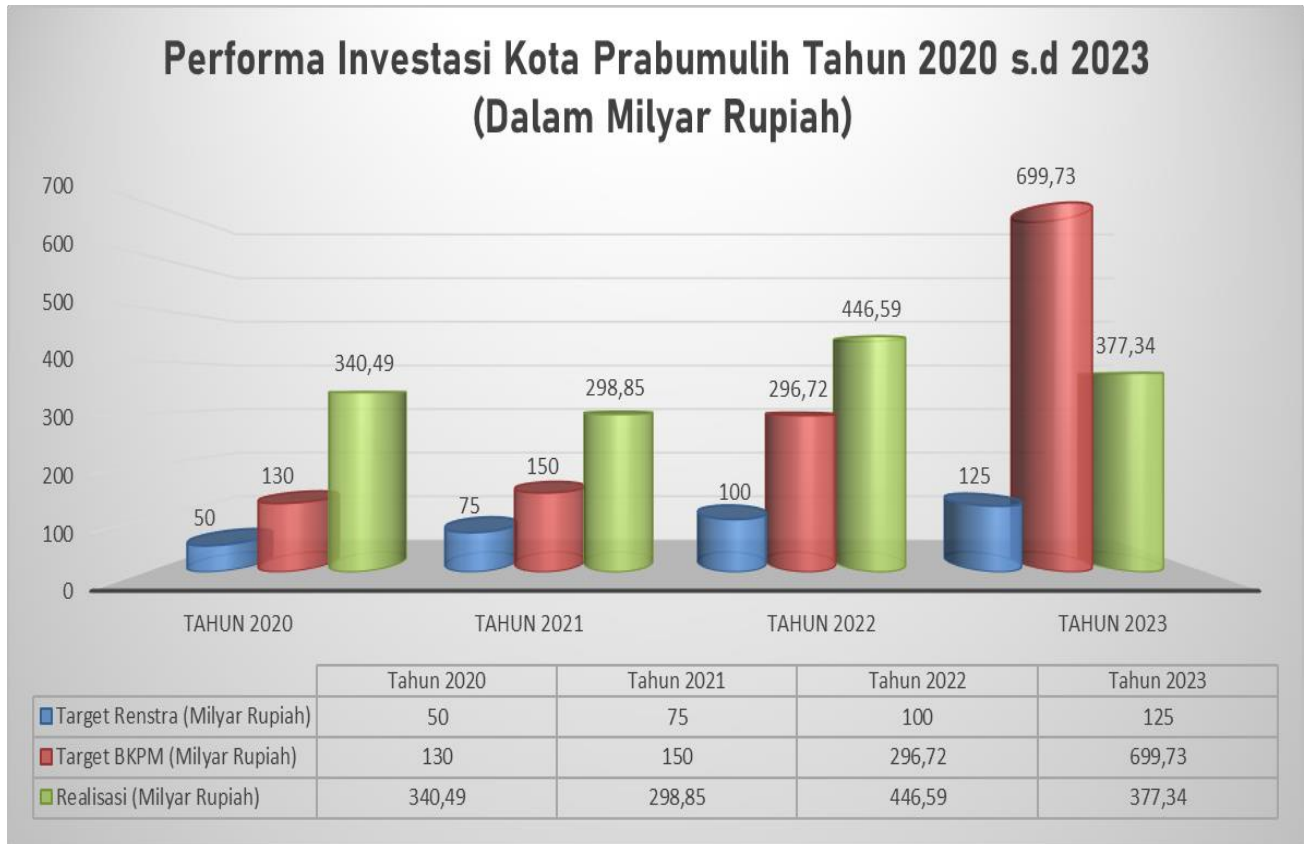


Sumber: LKPM Online 2023, diolah

Berdasarkan grafik di atas, investasi di sektor Jasa Lainnya berkontribusi terbesar dibanding sektor-sektor yang lain yaitu sebesar Rp169,91 milyar (45%), dan terbesar kedua pada sektor konstruksi sebesar Rp82,09 milyar (22%) sedangkan terbesar ketiga adalah sektor perdagangan dan Reparasi sebesar Rp54,72 milyar (15%).

Untuk performa investasi Kota Prabumulih dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 2.4 Grafik Performa Investasi Kota Prabumulih Tahun 2020 s.d 2023**



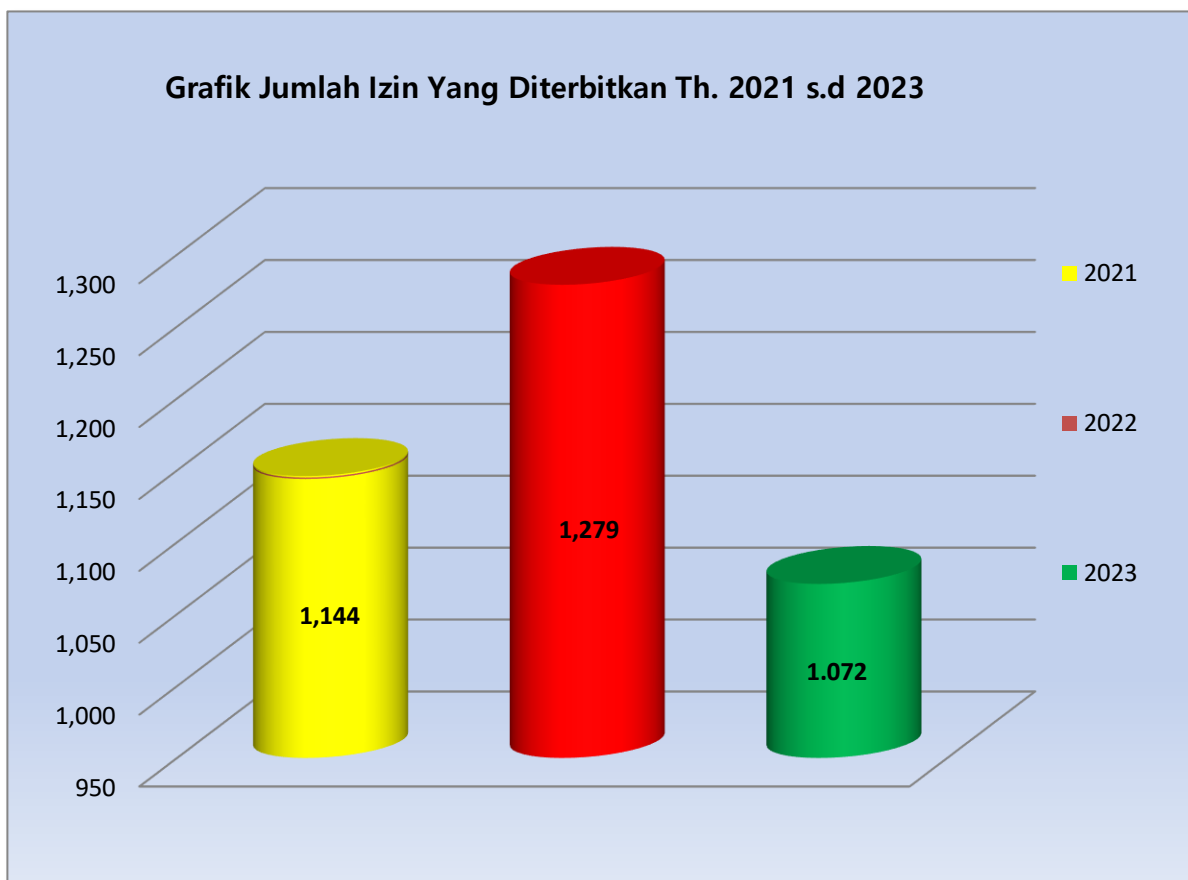
Sumber: Data LKPM Online, diolah

Salah satu tujuan strategis DPMPTSP Kota Prabumulih selain meningkatnya tata kelola dan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya realisasi investasi penanaman modal di Kota Prabumulih. Setiap tahun target investasi Kota Prabumulih ditentukan oleh BKPM RI melalui DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan target investasi Renstra sudah ditentukan pada awal pembuatan Renstra DPMPTSP 2018 - 2023. Dari grafik di atas, realisasi investasi kota Prabumulih dari tahun 2020 sampai 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2023, target yang ditentukan berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih adalah sebesar Rp125 Milyar dan nilai realisasinya sebesar Rp377,34 Milyar atau persentase pencapaiannya sebesar 301,88% dari target yang telah ditentukan.

Dalam era digitalisasi ini, bidang perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih telah menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik/TTE (*Digital Signature*) dalam dokumen dinas perizinan usaha sejak tahun 2019, dengan menggunakan TTE ini

artinya DPMPTSP Kota Prabumulih telah melaksanakan tujuan strategis dari *e-government* yaitu menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Adapun jumlah izin untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 2.5 Grafik Daftar Jumlah Izin Yang Diterbitkan Th. 2021 s.d 2023**



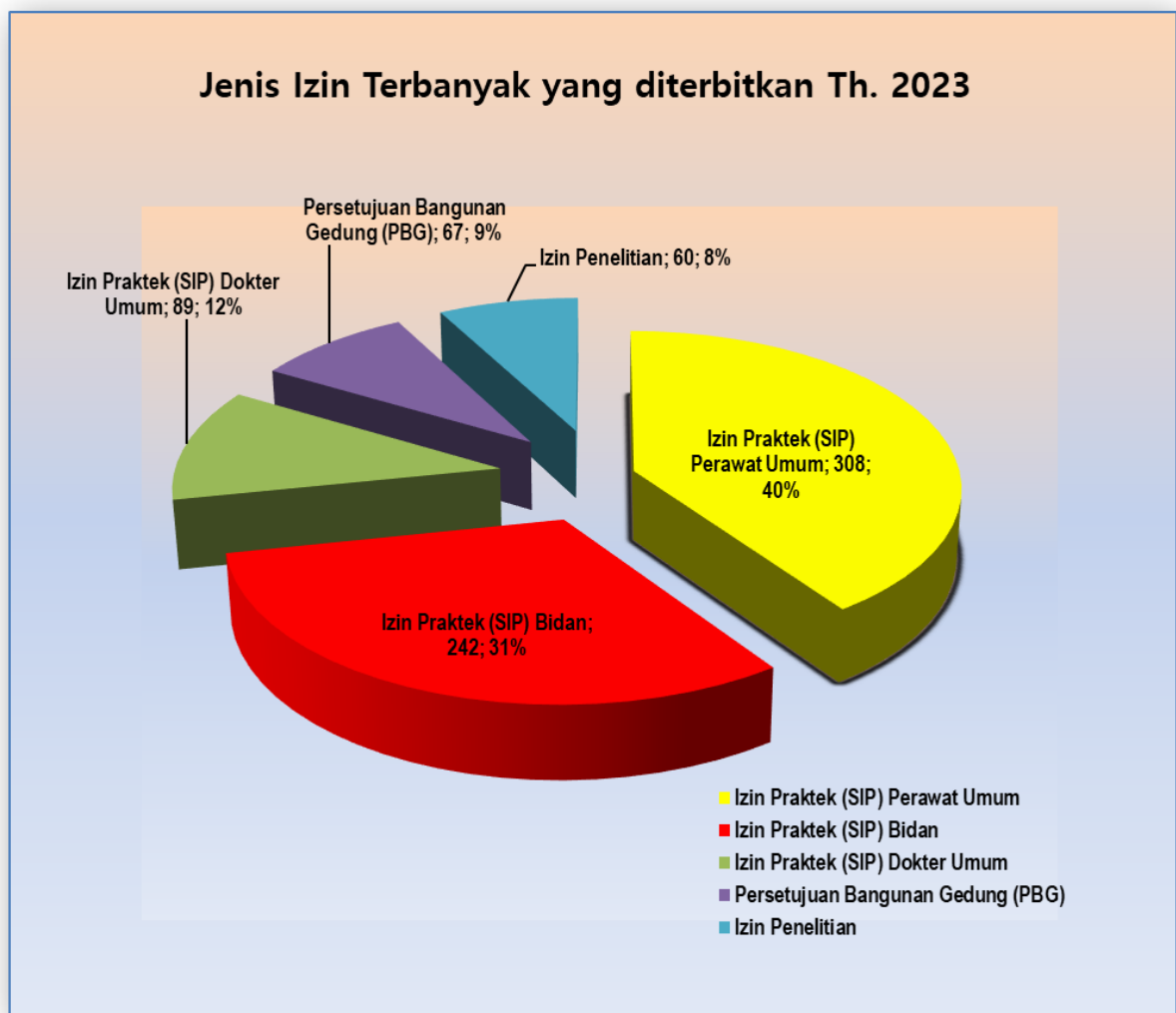
Sumber: Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan Sistem Informasi PM, diolah

Pada grafik diatas, jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2023 adalah sebanyak **1072 (Seribu tujuh puluh dua) izin**, dan mengalami sedikit penurunan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 19,30% jika dibandingkan dengan tahun 2022. (Data lengkap perizinan yang diterbitkan dapat dilihat pada lampiran).

Presiden Jokowi mengingatkan perlunya memanfaatkan momentum kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia untuk memacu investasi berkelanjutan, pemerintah harus mengikuti perkembangan era digital, termasuk dalam proses perizinan telah menjadi keharusan untuk DPMPTSP Kota Prabumulih harus

meningkatkan Layanan Perizinan dan Non Perizinan agar beroperasi secara optimal bagi masyarakat yang datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Prabumulih serta bagi masyarakat yang berkendala untuk datang ke kantor atau yang akan mengurus perizinan secara *online* dapat menggunakan layanan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik secara mandiri. Dari 85 (*delapan puluh lima*) jenis izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2023, berikut 5 jenis izin terbanyak yang diterbitkan dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 3.16 Grafik Jenis Izin Terbanyak yang diterbitkan Th. 2023**



Sumber: Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan Sistem Informasi PM, diolah

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU/SPM/IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	BB	A	A	BB	-	A	A	Nilai SAKIP Tahun 2023 Belum dikeluarkan oleh Inspektorat sebagai Tim Evaluator SAKIP
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84	88	88	88	90	88,59	90,15	88	90	
4	Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Milyar	10	50	75	100	125	Rp446,5 Milyar	Rp377,3 Milyar	Rp300 Milyar	Rp125 Milyar	
	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Milyar					50				Rp50 Milyar	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Prabumulih dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan DPMPTSP, meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan/non perizinan dan meningkatkan nilai investasi di Kota Prabumulih.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di DPMPTSP Kota Prabumulih masih perlu terus dioptimalkan, sehingga penyelenggaraan penanaman modal yang berkelanjutan dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menjadi lebih baik.

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih sampai saat ini adalah belum tersedianya dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, Detail Engineering Design dan business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor. Dokumen ini dapat memberi kemudahan bagi calon investor untuk menemukan potensi Kota Prabumulih berdasarkan data dan informasi yang valid, serta dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan ekonomi yang sedang tumbuh di Kota Prabumulih dan juga potensi pengembangan berbagai sektor ekonomi di Kota Prabumulih. Selain belum tersedianya dokumen tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan lainnya seperti:

1. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan penanaman modal;
2. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian kemudahan berinvestasi di Kota Prabumulih;
3. Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Prabumulih belum diperbaharui, sehingga sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini;
4. Belum terpenuhinya secara maksimal sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik;

5. Promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investor di Kota Prabumulih;
6. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal masih terbatas dan belum mutakhirnya data informasi penanaman modal kota Prabumulih;
7. Pendidikan dan Pelatihan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu masih sangat terbatas;
8. Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UMKM;
9. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Prabumulih belum beroperasi secara optimal dan belum adanya Dokumen Penandatanganan Komitmen atas kesanggupan penyelenggaraan MPP.

Dari beberapa permasalahan diatas, tentunya akan berdampak pada pencapaian visi misi Walikota Prabumulih dimana salah satu Misi Walikota Prabumulih pada poin (1) adalah “Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih yang handal dan merata melalui Perdagangan dan Jasa” yang bertujuan agar terciptanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang merata agar meningkatnya realisasi penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Prabumulih. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi daerah.

Adapun Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD yaitu :

#### **A. Faktor Kekuatan:**

1. Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
2. Adanya standar operasional prosedur untuk tiap-tiap perizinan sebagai pedoman/ petunjuk prosedural yang jelas dan transparan berkaitan dengan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih;
4. Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal telah menggunakan SiCantik Cloud dan OSS.

#### **B. Faktor Kelemahan :**

1. Belum memadainya prasarana gedung kantor;
2. Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Aparatur masih terbatas;
3. Belum memadainya jumlah tenaga teknis bidang perizinan;
4. Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor baru;
5. Belum optimalnya penggunaan sistem pelayanan perizinan terpadu.
6. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Prabumulih belum beroperasi secara optimal dan belum adanya Dokumen Penandatanganan Komitmen atas kesanggupan penyelenggaraan MPP.

#### **C. Faktor Peluang:**

1. Sistem Birokrasi Pemerintah Kota Prabumulih yang sudah mulai tertata dengan baik;
2. Tersedianya sarana media cetak, elektronik dan website yang memudahkan penyebaran informasi;

3. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara OPD Teknis dan DPMPTSP.

#### **D. Faktor ancaman**

1. Regulasi perizinan yang sering mengalami perbaikan sejalan dengan adanya peraturan baru;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Semakin meningkatnya kontrol dan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat;
4. Perkembangan teknologi informasi.

#### **2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan rincian hasil penilaian penyelenggaraan publik Pemerintah Daerah tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, pada unit layanan DPMPTSP dengan periode penilaian Juni - Oktober 2023, DPMPTSP Kota Prabumulih mendapatkan hasil penilaian 0% untuk kategori "Ketersediaan jaminan pelayanan". Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya jaminan pasti pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih kepada masyarakat untuk memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Untuk itu ke depan DPMPTSP Kota Prabumulih akan mengevaluasi SOP yang dijadikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan dalam proses pelayanan perizinan yang saat ini masih ditetapkan oleh Kepala Dinas dan akan dirancang dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah tentang SOP Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Prabumulih, sehingga DPMPTSP sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan telah memiliki pedoman yang lebih kuat dalam melaksanakan tugas. Dalam peraturan tersebut akan diatur juga terkait penghargaan dan sanksi terhadap pegawai sehingga masyarakat pemohon izin memiliki jaminan akan pelayanan yang diberikan.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan perencanaan pelayanan terpadu satu pintu, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Rancangan Awal) disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka perumusan kegiatan dalam RKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Substansi Kegiatan Sesuai Permendagri Nomor 10 Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Substansi Kegiatan Sesuai Permendagri Nomor 10 Tahun 2023</b>	<b>Diakomodir dalam RKPD 2024</b>
1	PSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan <i>tracking system</i> (Implementasi SPIPISE)	✓
2	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal	✓
3	Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal	✓
4	Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal	✓
5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) kepada provinsi dan kabupaten/kota	✓
6	Fasilitasi penyelesaian masalah	✓

## **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan OPD merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Walikota Prabumulih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;**
- 2. Terlaksananya Realisasi Investasi Penanaman Modal ditunjang Pelayanan Perizinan/Non Perizinan yang Prima dan Berkualitas.**

### **3.2.2 Sasaran Strategis**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah.

**Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2025**

No.	Sasaran Renstra	Indikator		Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	1.	Nilai SAKIP	SAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja berupa peringkat/predikat dalam mengidentifikasi kemampuan OPD perihal merencanakan, menyelaraskan, dan melaporkan capaian kinerja
		2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	LAKIP Laporan Keuangan	
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		Survey Kepuasan Masyarakat	<b>Nilai SKM</b> = Nilai Indeks x Nilai Dasar SKM (25)
3	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi		Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) Online Kota Prabumulih	Realisasi Investasi Tahun N / Target Investasi Tahun N x 100

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2025	
							Target	Pagu (Rp)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000
				2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
				2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
				2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000
				2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	7.602.427.308
				2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	53.280.000
				2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000
				2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000
				2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.800.000

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2025	
							Target	Pagu (Rp)
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.500.000
				2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72.000.000
				2.18.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000
				2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000
				2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000
				2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	14.000.000
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
				2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
				2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.000.000
				2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000
				2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.000.000
				2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2025	
							Target	Pagu (Rp)
				2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	75.000.000
				2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000
				2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	450.000.000
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000
				2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	40.000.000
				2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	65.000.000
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000
				2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000
				2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000
				2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	120.000.000
				2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2025	
							Target	Pagu (Rp)
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000
				2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	20.000.000
				2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	12 Pelaku Usaha	15.000.000
				2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	150 Kegiatan Usaha	30.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	30.000.000
				2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	210.000.000
				2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	300.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha	30.000.000

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2025	
							Target	Pagu (Rp)
				2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	50.000.000
				2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	50 Kegiatan Usaha	30.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	80.000.000
						<b>Total</b>		<b>10.644.507.308</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DPMPTSP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025**

Alokasi anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025

Rencana Kerja Tahun 2025					
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	7.602.427.308
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	53.280.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.800.000

Rencana Kerja Tahun 2025					
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.500.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	14.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	75.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	450.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	40.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	65.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000

Rencana Kerja Tahun 2025					
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	120.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	20.000.000
		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	12 Pelaku Usaha	15.000.000
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	150 Kegiatan Usaha	30.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	30.000.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	210.000.000
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	300.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha	30.000.000
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	50.000.000

Rencana Kerja Tahun 2025					
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	50 Kegiatan Usaha	30.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	80.000.000
			<b>Total</b>		<b>10.644.507.308</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 - 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kota Prabumulih serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2025.

Rencana Kerja DPMPTSP ini digunakan sebagai bahan dalam forum OPD dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023.